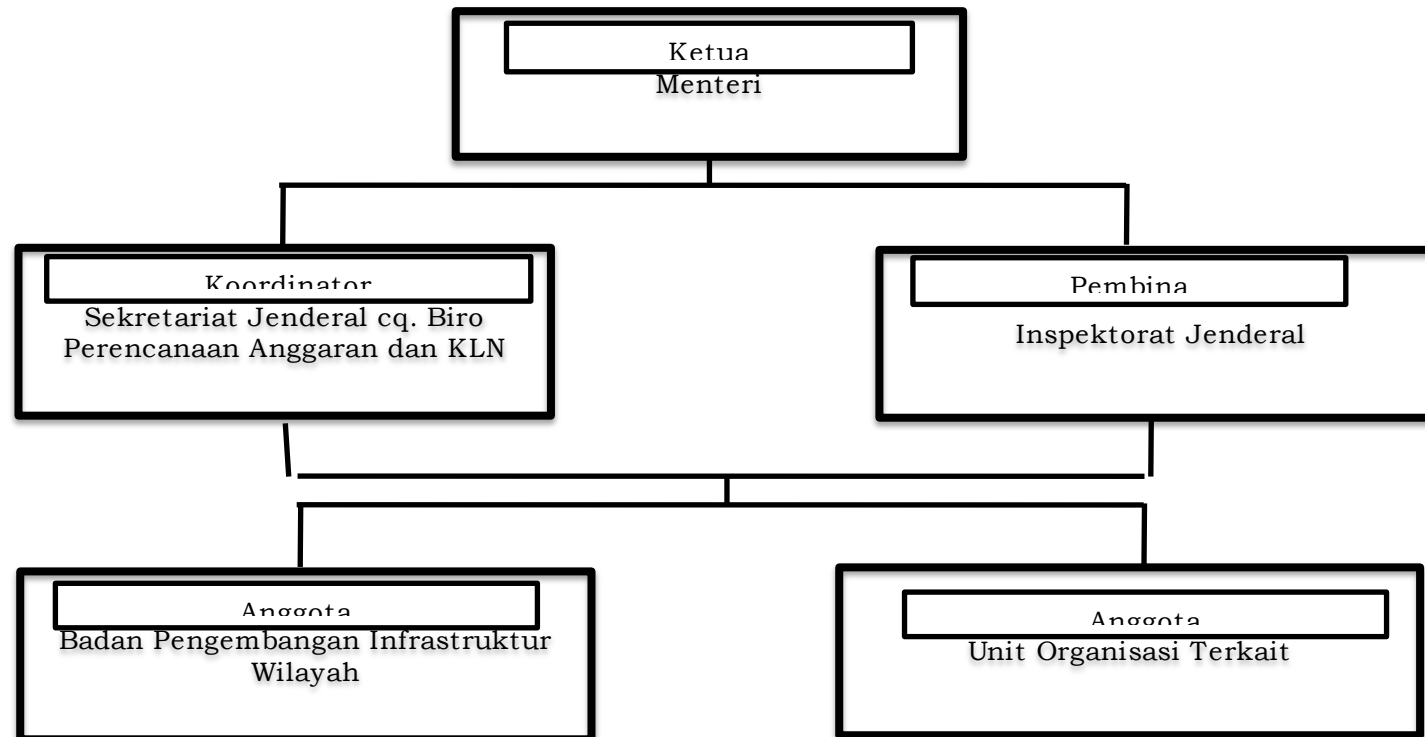


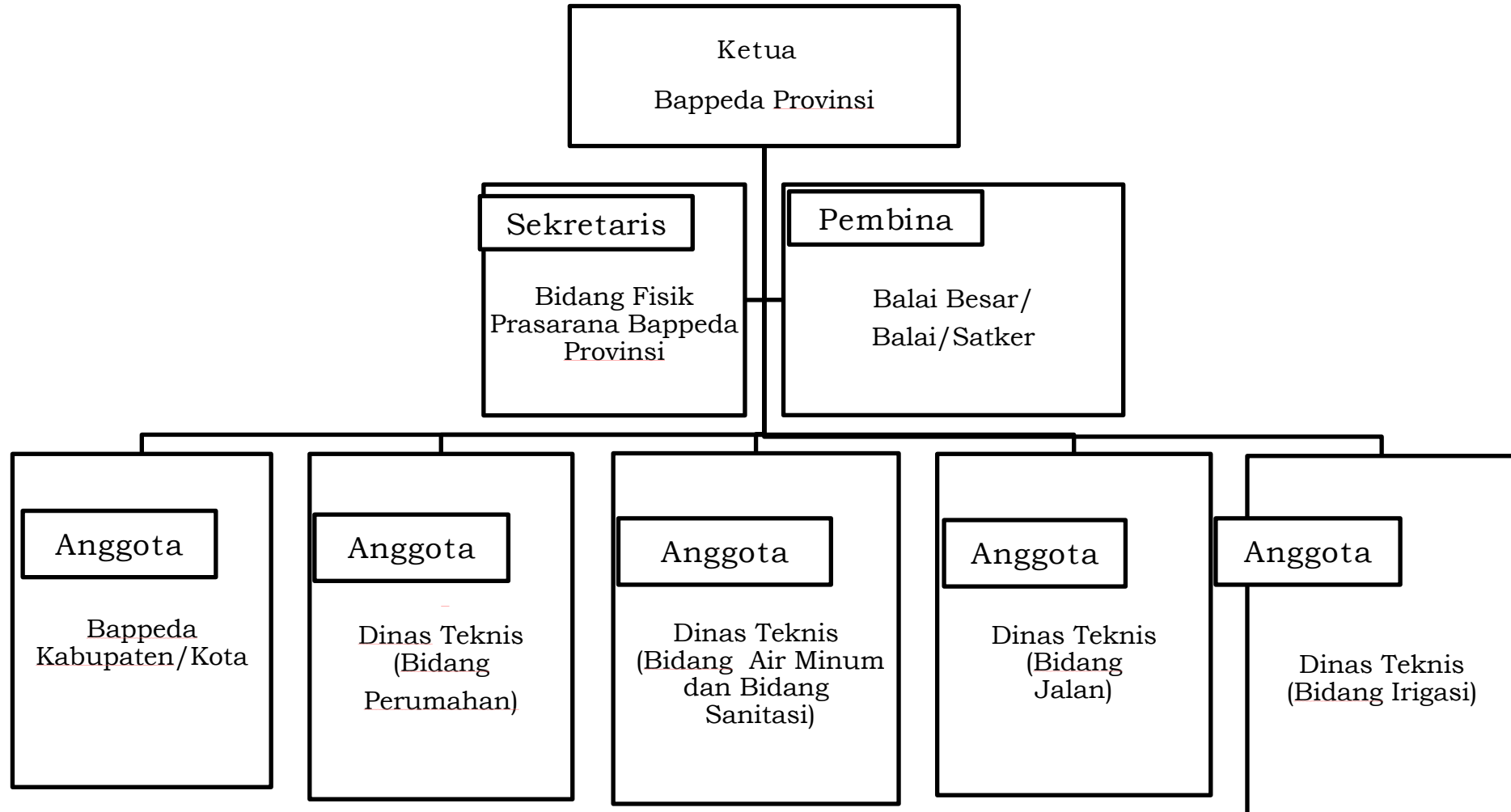
LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PRT/M/2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG INFRASTRUKTUR

STRUKTUR ORGANISASI DAN ALUR KOORDINASI TIM KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH

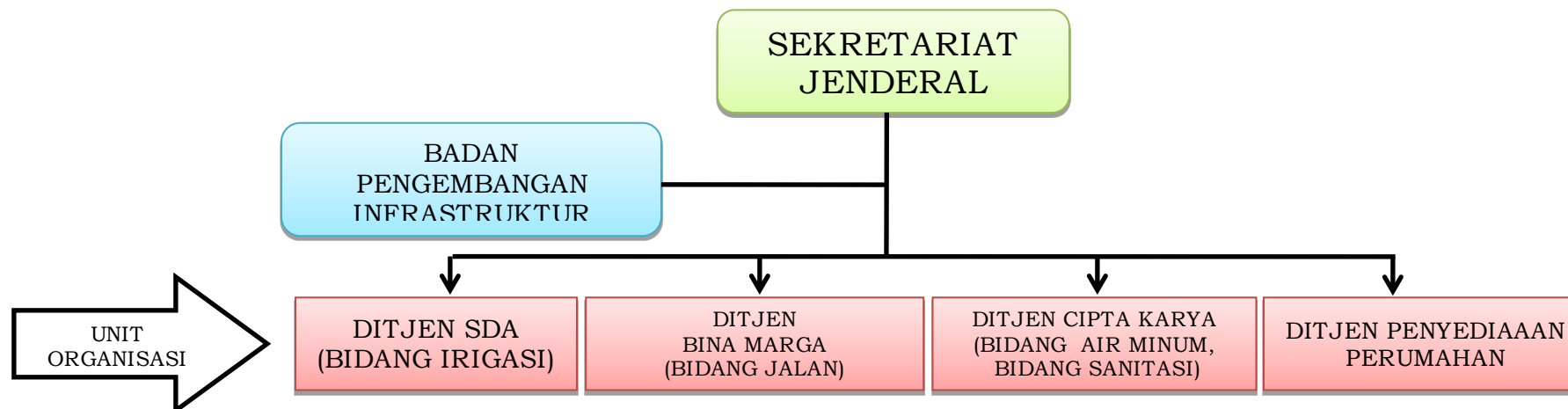
STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI PUSAT,



STRUKTUR ORGANISASI
TIM KOORDINASI DAERAH



BAGAN ALUR PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAK BIDANG INFRASTRUKTUR

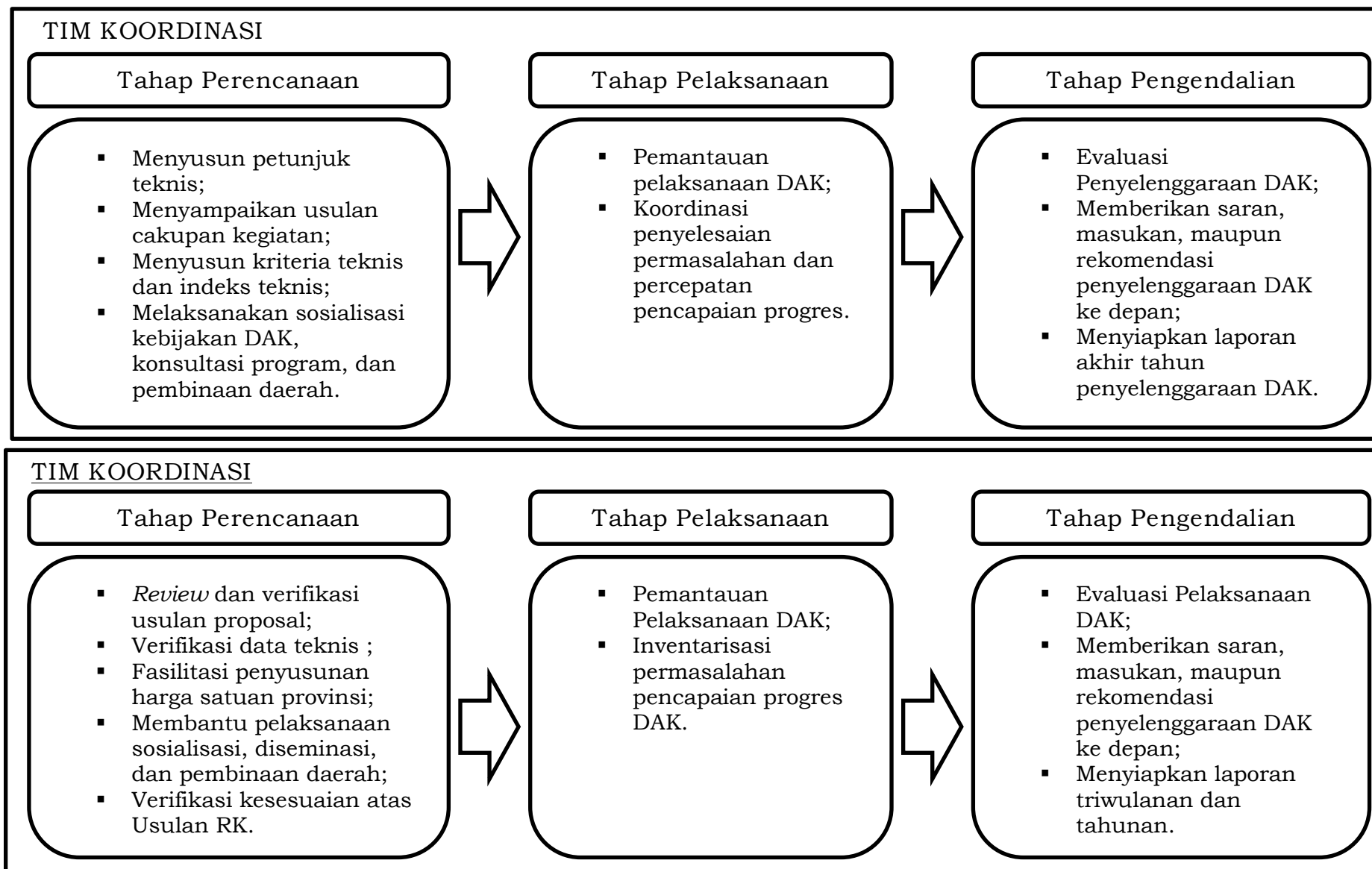


CATATAN:

1. **Sekretariat Jenderal** adalah Koordinator penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur.
2. **Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah** yang selanjutnya disebut sebagai BPIW adalah Badan yang mempunyai fungsi pengembangan keterpaduan infrastruktur wilayah.
3. **Unit Organisasi** adalah Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan kegiatan di Bidang Infrastruktur

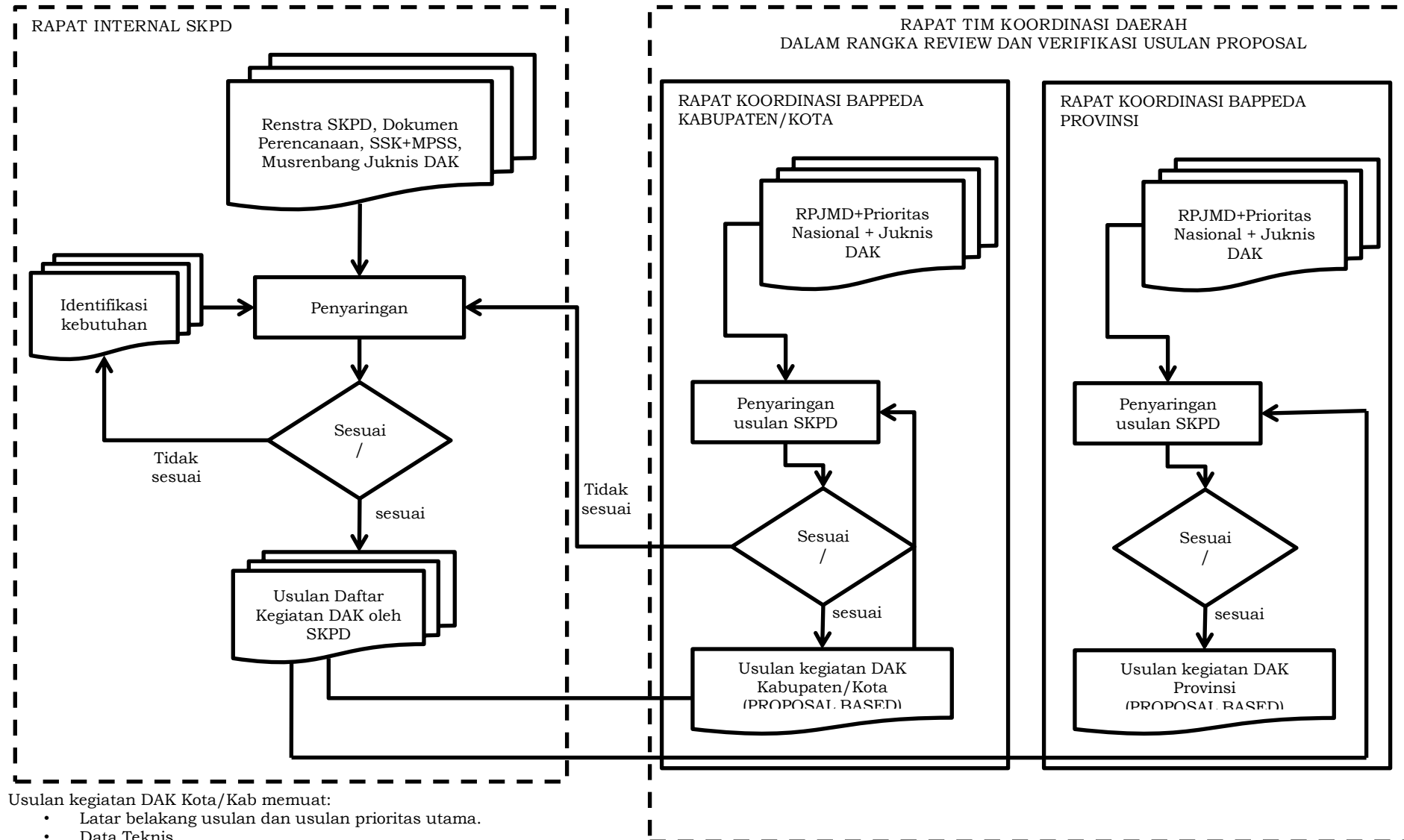
Mekanisme perencanaan dan pemrograman untuk masing-masing Bidang sesuai ketentuan pada Lampiran I untuk Bidang Jalan, Lampiran II untuk Bidang Irigasi, Lampiran III untuk Bidang Air Minum, Lampiran IV untuk Bidang Sanitasi, dan Lampiran V untuk Bidang Perumahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH



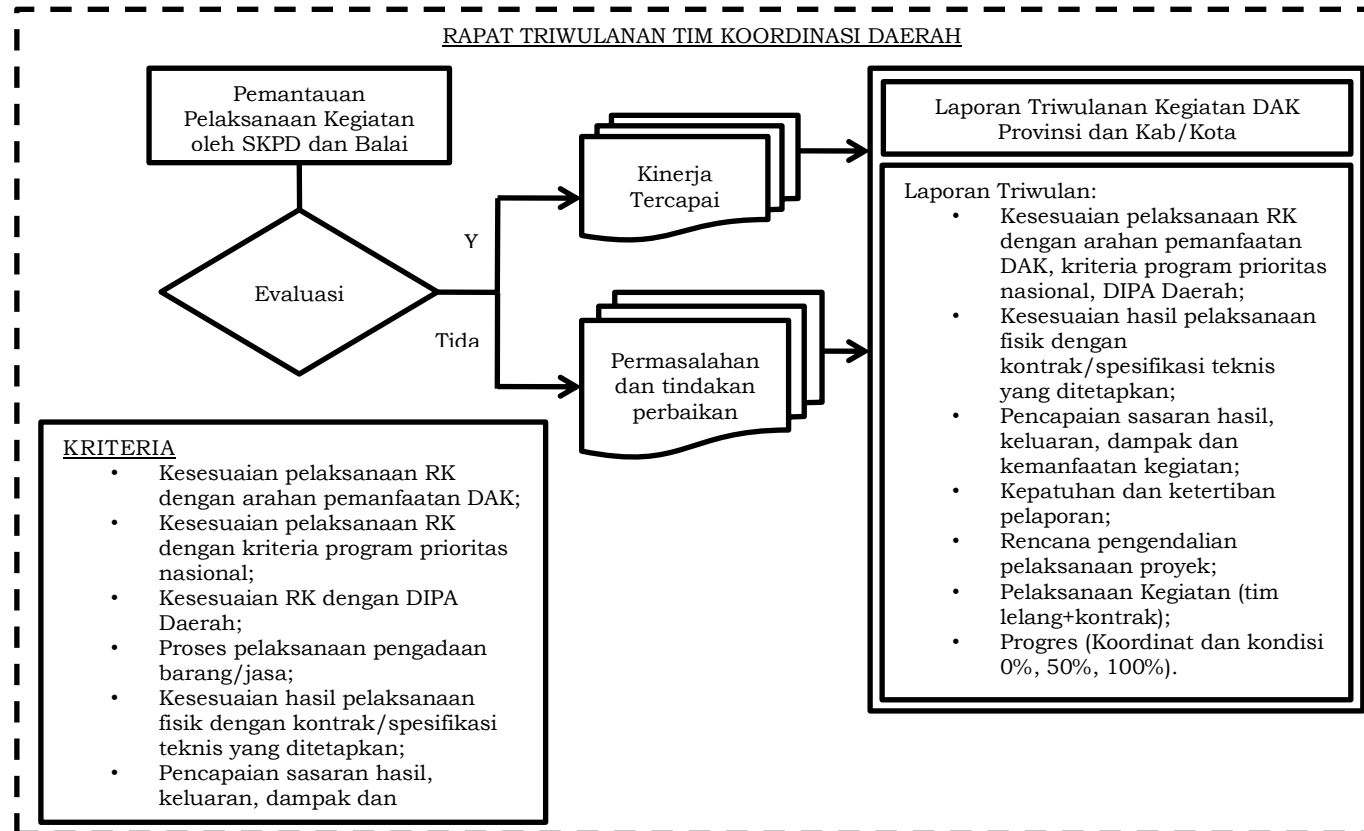
TAHAP PERENCANAAN :

PROSES PENYUSUNAN USULAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

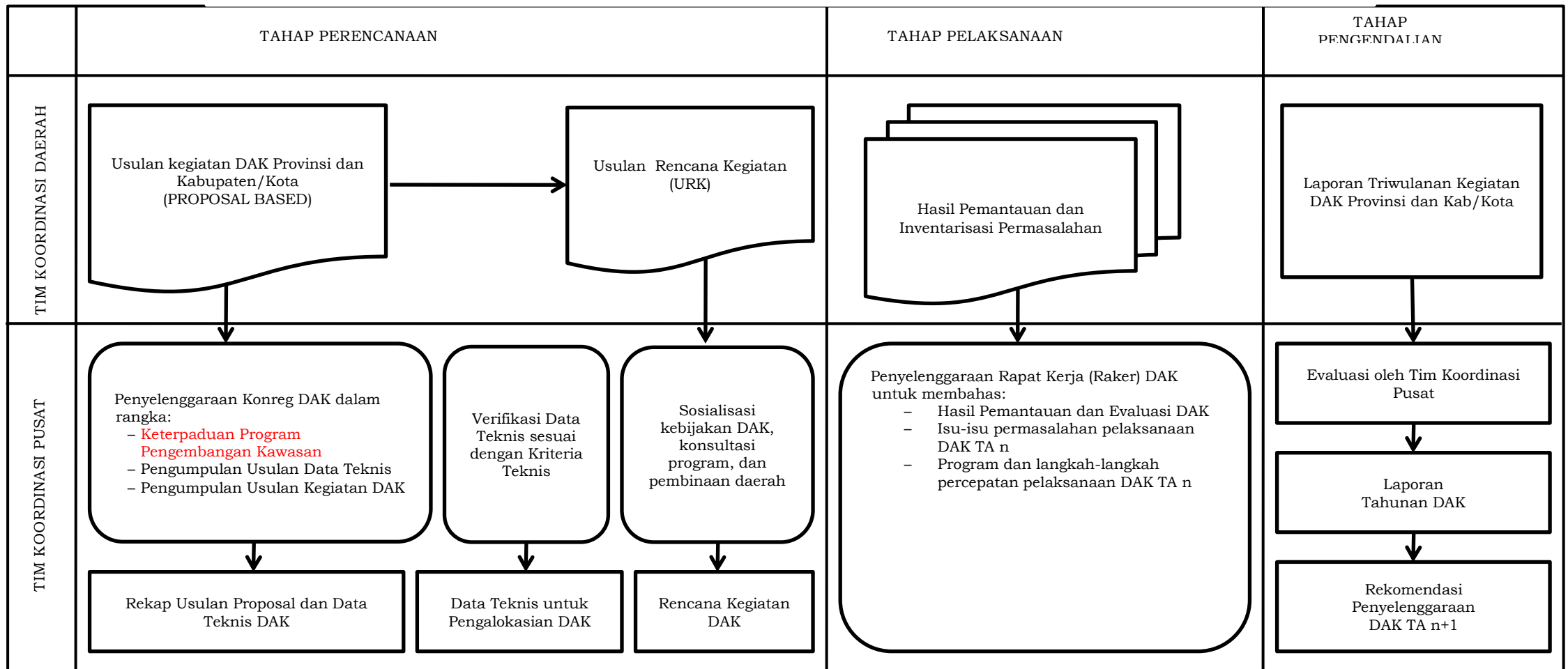


- Usulan kegiatan DAK Kota/Kab memuat:
- Latar belakang usulan dan usulan prioritas utama.
 - Data Teknis
 - Rekap lokasi dan RAB
 - Kontribusi thd target daerah (RPJMD, Prioritas Nasional,)

TAHAP PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN :
 PROSES PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN TRIWULANAN
 TIM KOORDINASI DAERAH



ALUR KOORDINASI ANTARA TIM KOORDINASI PUSAT DAN TIM KOORDINASI DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,
Siti Martini
NIP. 195803311984122001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO